

PROSES PENYUSUNAN LAPORAN BENDAHARA DAN LAPORAN KEUANGAN MELALUI APLIKASI SPRINT DAN E-REKON PADA KPPN MEULABOH

Oleh

Sinta Delviani¹⁾, Rusdi²⁾

^{1,2}Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Teuku Umar Meulaboh

Email: ¹sintadelviani13@gmail.com, ²rusdi@utu.ac.id

Abstract

This study aims to describe how the process of preparing the Treasurer's Accountability Report (LPJ) on the SPRINT application and the preparation of Financial Statements on the E-rekon LK application. This research method uses qualitative research methods. Where qualitative research is descriptive research and tends to use inductive analysis and approaches (Rahmat, 2019). With data collection techniques, namely from primary data and secondary data, where primary data was obtained from interviews that were asked directly to the Verification and Accounting Section employees at KPPN Meulaboh and secondary data was obtained from the Ministry of Finance and DJPB websites online. This research was conducted at KPPN Meulaboh Jl.sisingamangaraja, West Aceh Regency. And also this research was carried out from March 2021 to August 2021. However, the problem that sometimes arises is the delay in submitting the LPJ Treasurer and Financial Report to KPPN Meulaboh so that the preparation of LK related to BUN (State Treasurer) is late. The results of the use of these two applications can make the satker or KPPN easy and fast in preparing the LPJ Treasurer and Financial Statements.

Keywords : LPJ Treasurer, SPRINT, e-rekon LK

PENDAHULUAN

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ialah instansi yang bergerak di bidang keuangan. Beberapa tugas utama KPPN sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK/234/KMK.01/2015 pada Tanggal 21 Desember tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan adalah melaksanakan kewenangan Perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara (BUN), penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, dan penatausahaan penerimaan serta pengeluaran anggaran melalui dari kas Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan(Afifudin Zuhdi, Rizka Amelia, 2015).

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-162/PMK.05/2013 tanggal 15 November 2013 tentang Kedudukan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara *juncto* Peraturan Menteri Keuangan

Nomor PMK-230/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dalam rangka mewujudkan proses Penganggaran dan Pelaksanaan Anggaran yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, perlu di bangun Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara. Bahwa agar penerapan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara dapat berjalan efektif, perlu adanya ketentuan mengenai pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara seperti yang telah di cantumkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (INDONESIA, 2014)

Dalam proses pengelolaan rekening milik satker lingkup Kementerian Negara/Lembaga serta penyampaian

Pertanggungjawaban Bendahara, telah di dirilis Aplikasi SPRINT (Sistem Pengelolaan Rekening Terintegrasi) yang digunakan untuk keperluan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bendahara dan pengelolaan rekening berupa pembukaan, penutupan, dan pelaporan rekening. Aplikasi ini digunakan oleh Satuan Kerja(Satker), KPPN, Kanwil DJPb, Direktorat PKN(Pengelolaan Kas Negara) dan bank-bank yang terkoneksi.

Laporan Keuangan LK ialah suatu pertanggungjawaban pemerintah pada pelaksanaan APBN seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA) , Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)(PERTAHANAN & PETUNJUK, 2020). Dengan Laporan Keuangan ini kita dapat mengetahui kondisi keuangan Instansi dalam masa waktu tertentu. Pada tahun 2016, Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah melakukan keluaran baru dan melakukan kegiatan rekonsiliasi dalam menyusun laporan keuangan melalui aplikasi berbasis *web* atau disebut dengan E-rekon Lk. Adapun di keluarkannya kebijakan penggunaan aplikasi E-rekon LK maka proses penyusunan laporan keuangan oleh K/L menjadi cepat, mudah, sederhana dan akurat.

Hasil rekonsiliasi nantinya akan dituangkan dalam BAR (Berita Acara Rekonsiliasi) yang di tandatangi oleh kedua belah pihak. Aplikasi E-rekon dipakai untuk mengonsolidasi data semua satuan kerja juga untuk rekonsiliasi antara satuan kerja dengan KPPN. Dengan ada E-rekon ini maka rekonsiliasi menjadi sangat mudah dan bisa dilakukan satker dimana saja tanpa harus ke Kantor lagi, single database (data tunggal) dimana isi data semua satker di kementerian lembaga dapat membantu K/L(Kementerian/Lembaga) untuk penyusunan Laporan Keuangan.

Adapun tujuan penulis mengangkat judul ini karena penulis ingin mengetahui bagaimana proses penyusunan Laporan

Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara pada aplikasi SPRINT dan proses penyusunan Laporan Keuangan pada aplikasi E-rekon dan apa saja dampak dari penggunaan kedua aplikasi tersebut.

Penelitian mengenai analisa aplikasi telah banyak dilakukan, salah satunya dilakukan oleh Gabril (2018) yang berjudul “Analisis Aplikasi E-REKON-LK Terhadap Rekonsiliasi Laporan Keuangan Pada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan Negara Provinsi Utara”. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa rekonsiliasi elektronik berbasis aplikasi website ini membuat proses rekonsiliasi menjadi lebih mudah dimana laporan keuangan hanya ada pada tingkat terendah antara Pemerintah Daerah dan Kantor Perbendaharaan yang melakukan semua transaksi data keuangan agar memenuhi efektivitas dan efisiensi, serta akuntabilitas dan transparansi dalam laporan keuangan(Jean Gabril Oflagi¹, Hendrik Manossoh², 2018).

LANDASAN TEORI

LPJ Bendahara

LPJ Bendahara ialah Laporan Pertanggungjawaban atas uang yang dikelola pada bendahara, baik bendahara penerimaan ataupun bendahara pengeluaran. Adapun tujuan LPJ Bendahara yaitu agar memenuhi amanat reformasi di bidang Keuangan Negara dengan diberikan pedoman/pengaturan mengenai penata usahaan kas bendahara satker(Berita, 2018).

Aplikasi SPRINT

Aplikasi SPRINT ialah aplikasi berbasis *web* yang dikeluarkan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan yang digunakan untuk mempermudah proses izin pembukaan rekening pemerintah dan pelaporan Pertanggungjawaban Bendahara oleh satuan kerjake KPPN sebagai Kuasa BUN Daerah(Sprint & Lpj, n.d.). Tujuan dari aplikasi SPRINT adalah unuk mempermudah proses izin pembukaan rekening pemerintah dan pelaporan Pertanggungjawaban Bendahara

pada satuan kerja ke KPPN sebagai Kuasa BUN (Bendahara Umum Negara) Daerah.

Laporan Keuangan LK

Laporan Keuangan LK ialah pertanggungjawaban pemerintah pada pelaksanaan APBN berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) (PERTAHANAN & PETUNJUK, 2020). Tujuan dari Laporan Keuangan ialah menyediakan informasi dengan menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang berguna untuk sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan.

E-rekon-LK

E-rekon-LK ialah aplikasi berbasis web dan dikembangkan untuk memudahkan rekonsiliasi transaksi keuangan juga penyusunan laporan keuangan oleh Kementerian Negara/Lembaga (Berita, 2017). Adapun tujuan dari E-rekon-LK yaitu agar rekonsiliasi menjadi sangat mudah dan bisa dilakukan satker dimana saja tanpa harus ke Kantor lagi, single database (data tunggal) dimana isi data semua satker di kementerian lembaga dapat membantu K/L (Kementerian/Lembaga) untuk penyusunan Laporan Keuangan.

Rekonsiliasi

Rekonsiliasi ialah tahap mencocokkan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sitem/subsistem yang beda berdasarkan dokumen yang sama (No.104/PMK.05/2017, 2017). Adapun fungsi dari rekonsiliasi yaitu untuk mencocokkan rekening satker dengan Bank, dengan dibandingkan saldo UP didalam LPJ dan kartu pengawasan kredit anggaran, dan dibandingkan saldo awal LPJ sama saldo akhir LPJ bulan sebelumnya, mengetes kecocokan nilai uang di Rekening Bank sama rekening koran bendahara, dan dibandingkan data rekening bendahara dengan rekening yang telah diterbitkan persetujuan di SPRINT.

Satuan Kerja (SATKER)

Satker ialah Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang merupakan bagian dari satu unit organisasi pada Kementerian Negara/Lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan pada suatu program (TENTANG, 2011).

METODE PENELITIAN

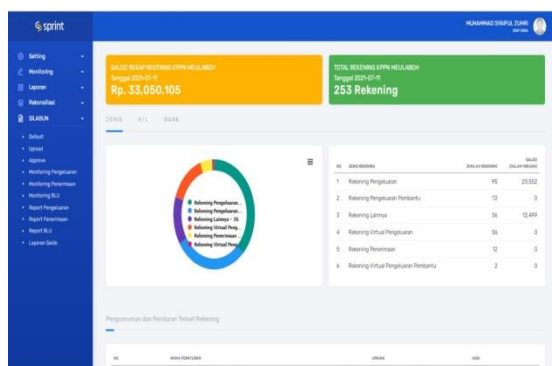
Penelitian yang digunakan ialah penelitian Deskriptif Kualitatif. Dimana Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dan pendekatan induktif (Rahmat, 2019). Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif karena penulis ingin mengetahui bagaimana proses penyusunan LPJ bendahara pada aplikasi SPRINT dan Laporan Keuangan pada aplikasi E-Rekon LK. Penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Meulaboh. Dengan teknik pengambilan data ialah data primer dengan data sekunder, yang data primer diambil dari wawancara dengan ditanyakan langsung ke pegawai Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN Meulaboh dan data sekunder diperoleh dari Kemenkeu dan DJPB secara online. Penulis mewawancarai pegawai Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN Meulaboh untuk mendapatkan informasi tentang proses penyusunan LPJ Bendahara dan Laporan Keuangan pada aplikasi SPRINT dan e-rekon LK. Tujuan penulis disini adalah untuk mengetahui bagaimana proses penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara pada aplikasi SPRINT dan proses penyusunan Laporan Keuangan pada aplikasi E-rekon dan apa saja dampak atas penggunaan dari aplikasi SPRINT dan e-rekon LK.

HASIL DAN PEMBAHASAN

DJPB (Direktorat Jenderal Perbendaharaan) telah mengeluarkan program aplikasi yaitu SPRINT (Sistem Pengelolaan Rekening Terintegrasi) yang digunakan untuk keperluan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)

bendahara dan pengelolaan berupa pembukaan, penutupan, dan pelaporan rekening. Pengguna dapat mengakses melalui internet di alamat <http://sprint.kemenkeu.go.id>. Untuk mengakses menu-menu pada aplikasi SPRINT, pengguna harus memasukkan user dan sandi yang diperoleh dari KPPN mitra kerja yaitu pengguna untuk KPA dan staff (Bendahara).

Gambar 1. Aplikasi yang digunakan dalam penyusunan LPJ Bendahara



Adapun sedikit penjelasan dari menu yang sering dipakai pada aplikasi SPRINT, berikut penjelasannya :

Rekonsiliasi

Fungsi rekonsiliasi yaitu untuk mencocokkan rekening satker dengan Bank, dengan dibandingkan saldo UP didalam LPJ dan kartu pengawasan kredit anggaran, dan dibandingkan saldo awal LPJ sama saldo akhir LPJ bulan sebelumnya, mengetes kecocokan nilai uang di Rekening Bank sama rekening koran bendahara, dan dibandingkan data rekening bendahara dengan rekening yang telah diterbitkan persetujuan di SPRINT.

Upload

Upload digunakan untuk mengunggah ADK LPJ dan hanya di unggah oleh staf Satker, pada menu upload ini dipastikan bahwa ADK LPJ telah benar dan diterima oleh KPPN.

Aplikasi sprint memiliki dua kewenangan yaitu ada kewenangan User Staf dan kewenangan User KPA(Kuasa Pengguna Anggaran), kewenangan tersebut antara lain :

User Staf

Pengunggahan ADK LPJ hanya dilakukan oleh staf satker melalui fitur menu upload pada aplikasi SPRINT dan dapat juga mengupload melalui aplikasi silabun secara langsung. Satker memastikan bahwa bukti pendukung telah lengkap seperti rekening koran, pemeriksaan kas dan rekonsiliasi, LPJ, rician kas di Rekening, dan laporan saldo rekening.

KPA(Kuasa Pengguna Anggaran)

KPA bertugas untuk melakukan pengecekan LPJ yang telah di upload oleh user staf. KPA wajib menyetujui atau menolak LPJ yang telah di upload user staf.

Proses Penyusunan LPJ Bendahara pada Satker (Satuan Kerja)

Proses yang harus dilakukan Satker untuk menyusun LPJ diantaranya adalah dengan melakukan pengecekan Pembukuan pada akhir bulan Pelaporan, pengecekan fisik kas, dan bahkan melakukan Rekonsiliasi Internal, tahap pengesahan dan pembuatan laporan. LPJ Bendahara diatur berdasarkan BKU (Buku Kas Umum), Buku-Buku Pembantu, dan Buku Pengawasan Anggaran yang diperiksa dan direkonsiliasi oleh KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) / PPK (Penjabat Pembuat Komitmen).

Dalam menyusun LPJ Bendahara Satker juga harus melakukan :

- 1) Posting terhadap transaksi yang telah di rekam
- 2) Mencetak pemeriksaan kas dan rekonsiliasi, LPJ, rician kas di rekening, dan laporan saldo yang di tanda tangani oleh Bendahara KPA
- 3) Bendahara mencetak rekening koran atas rekening yang digunakan
- 4) Jika pada periode bersangkutan terdapat penyetoran pajak ataupun PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak), Satker wajib melampirkan konfirmasi Penerimaan Negara yang telah divalidasi/disahkan oleh Seksi Bank KPPN

- 5) Dan Satker juga melakukan Upload ke aplikasi SPRINT dan menunggu persetujuan dari KPA.

Proses Penerimaan dan Pemeriksaan LPJ pada aplikasi SPRINT

Setelah satuan kerja melakukan upload ke aplikasi SPRINT, satuan kerja juga harus menyampaikan hard copy LPJ beserta dokumen pendukung ke KPPN. LPJ yang disampaikan tersebut akan dilakukan pemeriksaan dan verifikasi oleh pengawai *front office* Seksi Verifikasi dan Akuntansi pada KPPN.

Pemeriksaan dan verifikasi dimulai dengan memastikan data pada *hard copy* LPJ yang telah sesuai dengan data LPJ yang di Upload di Aplikasi SPRINT serta dokumen pendukung telah benar dan lengkap. Jika hasil pemeriksaan dan verifikasi dokumen LPJ tersebut dapat diterima, Kepala Seksi verifikasi dan Akuntansi akan melakukan pengasahan dan tanda tangan LPJ. Namun jika sebaliknya, dokumen LPJ tersebut di tolak oleh KPPN maka akan dilakukan perbaikan oleh satuan kerja yang bersangkutan.

Penyampaian LPJ Bendahara dilakukan setiap awal bulan dan batas waktu 10 hari kerja setelah bulan bersangkutan berakhir, dengan melampirkan Berita acara pemeriksaan kas dan rekonsiliasi, salinan rekening koran, daftar saldo rekening, dan daftar hasil konfirmasi surat setoran penerimaan Negara. Jika Satker belum menyampaikan LPJ Bendahara ke KPPN sesuai batas waktu yang sudah diberikan, pasti akan dikenakan sanksi sebagaimana akan ada penundaan penerbitan SP2D. Adapun dampak atas penggunaan aplikasi SPRINT yaitu proses penyusunan LPJ Bendahara menjadi lebih cepat dan mudah. Namun kendala dalam pemakaian aplikasi SPRINT ini ialah kendala jaringan, karena aplikasi ini berbasis web.

Proses Penyusunan Laporan Keuangan pada Satuan Kerja

Pengguna Anggaran harus menyusun laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Semesteran dan Tahunan. Penyusunan laporan keuangan dilaksanakan

berjenjang di tingkat UAKPA (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran) sampai di tingkat UAPA (Unit Akuntansi Pengguna Anggaran). Pada tingkat UAKPA, penyusunan laporan keuangan dimulai dari proses posting seluruh transaksi hingga periode tersebut di aplikasi SAIBA dengan benar juga tepat. Setelah dilakukan posting, satker (UAKPA) melakukan unggah ADK SAIBA ke aplikasi e-rekon LK agar dilakukan Rekonsiliasi data keuangan dan di verifikasi oleh KPPN.

Setelah ADK tersebut diterima oleh KPPN, maka pada aplikasi e-rekon ADK tersebut di tanda tangan oleh KPA dan Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi hingga menghasilkan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR). Setelah BAR di terbitkan satker dapat mengunduh dokumen laporan keuangan pada aplikasi e-rekon LK seperti Neraca, Laporan rekonsiliasi Anggaran (LRA), laporan operasional (LO), Neraca Percobaan, dan laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Dokumen laporan keuangan tersebut menjadi dasar atas penyusunan Laporan Keuangan tingkat satuan kerja sesuai dengan aturan maupun format yang berlaku di Kementerian Keuangan.

Proses Penerimaan dan Pemeriksaan Laporan Keuangan pada aplikasi E-Rekon

Setelah satker melakukan upload ADK SAIBA ke e-rekon LK, pengawai seksi Vera pada KPPN akan melakukan analisa hasil rekonsiliasi. Jika hasil rekonsiliasi terdapat perbedaan ataupun selisih antara pembukuan transaksi oleh sistem KPPN terhadap pembukuan oleh satker, rekonsiliasi satker tersebut di tolak dan dilakukan perbaikan serta upload ulang ADK SAIBA oleh satker. Jika hasil rekonsiliasi tersebut telah benar dan sesuai, rekonsiliasi tersebut diterima dan di teruskan ke KPA dan kepala Seksi Vera untuk di tanda tangani. Hasil rekonsiliasi ini akan menghasilkan BAR.

BAR menjadi dasar untuk menghasilkan komponen-komponen laporan keuangan seperti Neraca, Laporan rekonsiliasi Anggaran (LRA), laporan operasional (LO),

Neraca Percobaan, dan laporan Perubahan Ekuitas (LPE) yang dapat di unduh pada aplikasi e-rekon pada menu laporan. Komponen-komponen ini akan di susun menjadi laporan keuangan tingkat satker sesuai dengan aturan dan format yang berlaku pada kementerian terkait. Laporan keuangan tersebut di sampaikan ke Kantor Wilayah kementerian terkait dan ke KPPN. Adapun dampak atas penggunaan aplikasi e-rekon LK ini yaitu penyusunan Laporan Keuangan menjadi cepat dan mudah. Namun kendala dalam pemakaian aplikasi e-rekon LK ini ialah kendala jaringan, karena aplikasi ini berbasis web.

PENUTUP

Kesimpulan

Adapun hasil dari penelitian dan pembahasan tersebut tentang bagaimana proses penyusunan LPJ Bendahara pada aplikasi SPRINT dan proses penyusunan Laporan Keuangan pada aplikasi e-rekon LK di KPPN Meulaboh, maka dapat di simpulkan bahwa :

1. LPJ yang disusun Satker harus terlebih dulu melakukan pengecekan pembukuan pada akhir bulan pelaporan, pengecekan fisik kas, dan melakukan rekonsiliasi internal.
2. Satker harus menyampaikan hard copy LPJ beserta dokumen pendukung ke KPPN setelah melakukan upload ke aplikasi SPRINT. LPJ Bendahara harus dilaporkan ke KPPN setiap bulannya, jika tidak disampaikan tepat waktu maka akan dikenakan sanksi.
3. Adanya e-rekon LK K/L menjadi sangat mudah dan cepat dalam menyusun Laporan Keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan dimulai dari proses posting seluruh transaksi hingga periode tersebut pada aplikasi SAIBA dengan benar dan tepat, pegawai Seksi Vera pada KPPN akan melakukan hasil rekonsiliasi, jika hasil rekonsiliasi terdapat perbedaan antara pembukuan transaksi oleh

sistem KPPN terhadap pembukuan oleh Satker maka rekonsiliasi tersebut akan di tolak.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas tentang proses penyusunan LPJ Bendahara pada aplikasi SPRINT dan proses penyusunan Laporan Keuangan pada aplikasi e-rekon LK di KPPN Meulaboh, bahwa penulis mengharapkan :

1. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara sebelum memberikan sanksi untuk Satker yang belum menyampaikan LPJ Bendahara, penulis berharap agar pihak KPPN memberikan peringatan yang tegas terlebih dulu sebelum memutuskan untuk diberikan sanksi.
2. Penulis berharap pihak KPPN untuk memberitahu kepada Satuan Kerja agar dalam penyusunan Laporan Keuangan tidak ada kesalahan/perbedaan, sehingga pegawai Seksi Verifikasi dan Akuntansi pada KPPN Meulaboh dengan mudah melakukan rekonsiliasi, dan Satker pun tidak harus melakukan perbaikan lagi untuk mengupload ulang ADK pada aplikasi SAIBA.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Afifudin Zuhdi, Rizka Amelia, M. A. S. (2015). *ANALISIS SWOT (STRENGTHS, WEAKNESS, OPPORTUNITIES, THREATS) KEBIJAKAN RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) (Studi Kasus di Pasar Pratistha Harsa Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah)*. 1323203023, 10.
- [2] Berita. (2017). *BIMBINGAN TEKNIS VALIDASI E-REKON-LK UNTUK LAPORAN KEUANGAN YANG LEBIH BERKUALITAS*.
- [3] Berita. (2018). *Bendahara Satker Vertical Harus Patuhi LPJ*.

-
- [4] INDONESIA, K. K. R. (2014). *PETUNJUK TEKNIS PENATUSAHAN, PEMBUKUAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PADA SATUAN KERJA PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA SERTA VERIFIKASI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA*.
- [5] Jean Gabril Oflagi¹, Hendrik Manossoh², S. K. W. (2018). *ANALISIS APLIKASI E-REKON-LK TERHADAP REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN NEGARA PROVINSI UTARA*. 13(2), 693–704.
- [6] No.104/PMK.05/2017. (2017). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 104/PMK.05/2017 Tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga. *Indonesian Ministry of Finance Documentation*.
- [7] PERTAHANAN, K. P. R. P. P. D. P. K., & PETUNJUK. (2020). *PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA*.
- [8] Rahmat, P. S. (2019). *Penelitian Kualitatif*. <https://doi.org/10.31227/osf.io/wtncz>
- [9] Sprint, A., & Lpj, A. D. K. (n.d.). *Tutorial Aplikasi SPRINT (Sistem Pengelolaan Rekening Terintegrasi) Modul II SILABUN Level Satuan Kerja*.
- [10] TENTANG, P. M. K. R. I. N. 235/PMK. 05/201. (2011). *SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BADAN LAINNYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA*.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN